

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan pada kemampuan nasional, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperhatikan tantangan global. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui sistem pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu negara.

Pendidikan dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa tercermin dalam komitmennya terhadap pendidikan dan pencapaian pendidikan warganya. Kesuksesan pendidikan suatu negara dapat diukur dari sejauh mana tujuan dan pelaksanaannya sesuai. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bermoral, sehat, berpengetahuan, kreatif, mandiri, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan nasional berperan dalam mengembangkan kemampuan dan karakter, serta membangun peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerahkan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi semua peserta didik di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan setara lainnya.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, kurangnya sarana prasarana sekolah yang memadai, dan keterbatasan anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, tantangan paling berat di era globalisasi saat ini adalah bagaimana menyediakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan kompetitif untuk bersaing secara global (Sugiono, 2015).

Pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih terkendala, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, oleh minimnya sarana dan prasarana sekolah. Pentingnya peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa. Sarana dan prasarana tersebut merupakan indikator kualitas sekolah dan harus terus ditingkatkan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut penelitian Dwi Siswoyo dkk (2013), lingkungan dan sarana pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan. Lingkungan tersebut melibatkan aspek fisik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi proses pendidikan. Keterbatasan tempat belajar, perlengkapan, alat, dan materi pendidikan, kurangnya kerjasama antar lembaga masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan penduduk, serta biaya pendidikan yang tinggi dapat menghambat proses pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas yang disiapkan secara teliti dan berkelanjutan agar proses pembelajaran dapat berlangsung efisien dan efektif di masa depan.

Pemerintah telah mengambil langkah dengan menerapkan wajib belajar 9 tahun dan menyediakan dukungan melalui program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih baik dengan mendukung siswa secara finansial. Dana BOS, yang diberikan oleh pemerintah, digunakan untuk biaya operasional sekolah dasar. Harapannya, dengan

adanya dana BOS ini, semua lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial dan orang tua tidak lagi diminta membayar biaya tambahan.

Salah satu langkah yang bisa diambil untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dengan efisien mengimplementasikan sistem informasi yang akurat dan responsif di sekolah-sekolah. Sistem informasi yang tepat dan responsif dapat membantu manajemen sekolah dalam merencanakan program dan menjalankan kegiatan operasional dengan efektif, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Tujuan dari program dana BOS memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UUD tersebut, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai dengan minat dan bakatnya, tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan memberikan keterampilan hidup kepada warga negara Indonesia, memungkinkan mereka untuk mengenali serta mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungannya.

Selama tiga tahun terakhir, Provinsi Jambi telah melaksanakan penyaluran dana BOS untuk pendidikan menengah. Implementasi program ini di tingkat sekolah merupakan langkah penting untuk memenuhi hak pendidikan setiap siswa, mengarah pada pemenuhan tujuan Negara Republik Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berikut rekap penyaluran dana BOS selama 3 tahun terakhir di Provinsi Jambi pada pendidikan menengah, yaitu:

Tabel 1.1 Rekap Penyaluran Dana BOS pada Jenjang SMA di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Tahap	2020	2021	2022
1	Rp 30.380.850.000	Rp 31.963.620.000	Rp 30.380.850.000
2	Rp 40.507.800.000	Rp 42.623.560.000	Rp 40.507.800.000
3	Rp 30.717.000.000	Rp 31.845.099.000	Rp 30.717.000.000

Sumber: Rekap penyaluran BOS Kemendikbud

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana besar untuk operasional sekolah, namun jika pengelolaannya tidak efisien, dana tersebut dapat disalahgunakan. Pengelolaan keuangan sekolah didasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian XIII, yang mengatur pendanaan pendidikan. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Dalam Bab I Pasal 1 juknis tersebut, beberapa ketentuan umum dijelaskan:

1. Dana BOS adalah dana untuk mendanai kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dana BOS Reguler dialokasikan untuk belanja operasional semua peserta didik di sekolah dasar dan menengah.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum di jenjang menengah.
4. .Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup data sekolah, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan secara online.
5. Peserta Didik adalah individu yang mengembangkan diri melalui pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) adalah kode unik yang membedakan siswa satu dengan lainnya, dikeluarkan oleh kementerian yang mengurus pendidikan.
7. Komite Sekolah adalah lembaga independen yang terdiri dari orang tua/wali murid, komunitas sekolah, dan masyarakat yang peduli pada pendidikan.

Pasal 2 juknis BOS menjelaskan prinsip pengelolaan dana BOS Reguler:

1. Fleksibilitas: Penggunaan dana BOS Reguler disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
2. Efektivitas: Penggunaan dana BOS Reguler diharapkan memberikan hasil optimal dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah.
3. Efisiensi: Penggunaan dana BOS Reguler harus meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin.
4. Akuntabilitas: Penggunaan dana BOS Reguler harus dipertanggungjawabkan secara keseluruhan sesuai peraturan.
5. Transparansi: Penggunaan dana BOS Reguler harus dilakukan secara terbuka dan mendukung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Pentingnya sistem informasi akuntansi yang tepat dalam sekolah sangat jelas. Sistem ini membantu mengontrol arus keuangan, memastikan akuntabilitas, dan mengoptimalkan sumber daya. Sebuah sekolah, sebagai entitas hukum yang memiliki identitasnya sendiri, memerlukan sistem informasi akuntansi yang efektif untuk memastikan efisiensi dalam operasionalnya dan mencapai kualitas pendidikan yang optimal.

Informasi dalam sistem akuntansi harus akurat dan sesuai dengan data yang ada di lembaga sekolah. Untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan serta penyimpangan dalam sistem informasi akuntansi, setiap lembaga memerlukan manajemen pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan bagian integral dari sistem informasi akuntansi. Ini mencakup proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku (Tuanakotta, 2014).

Pengolahan data transaksi seperti kas, piutang, penjualan, dan pembayaran biaya melibatkan penggunaan nota transaksi yang kemudian dicatat menggunakan Microsoft Excel. Namun, pendekatan ini dapat memperlambat proses pengumpulan data dan penyusunan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas mencakup transaksi penerimaan uang tunai yang meningkatkan aset perusahaan dalam bentuk kas (Mulyadi, 2016). Sistem penerimaan kas mencakup uang tunai atau surat berharga yang dapat digunakan segera, yang berasal dari penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lain yang menambah kas perusahaan (Mulyadi, 2013). Pencatatan penerimaan kas penting untuk mengontrol arus kas

masuk, membantu dalam penyusunan anggaran kegiatan mendatang, dan memudahkan pengelolaan aktivitas sekolah.

Pengeluaran kas, di sisi lain, melibatkan distribusi barang atau jasa kepada entitas lain serta pengumpulan pembayaran (Mujilan, 2015). Sistem pencatatan pengeluaran kas diperlukan untuk melacak anggaran yang telah dikeluarkan untuk keperluan sekolah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metode pencatatan yang lebih efisien dan terotomatisasi dalam manajemen keuangan sekolah.

SMA Negeri 8 Muaro Jambi adalah salah satu lembaga pendidikan menengah atas yang diatur dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lembaga ini berdiri sejak tahun 2004 dan berlokasi di Jalan Lintas Timur KM. 21, Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, SMA Negeri 8 Muaro Jambi memiliki kewajiban untuk mengelola keuangannya dengan tanggung jawab. Untuk membantu pengelolaan keuangan dengan efisien dan mencegah penyalahgunaan dana pemerintah, lembaga ini menggunakan sistem informasi akuntansi.

Dana BOS adalah salah satu sumber pendapatan sekolah, yang digunakan untuk keperluan operasional dan non-operasional. Namun, karena sifatnya yang fleksibel, dana BOS rentan terhadap manipulasi. Oleh karena itu, SMA Negeri 8 Muaro Jambi mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pemerintah. Dalam pengelolaan dana BOS, mereka menerapkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi. Fleksibilitas berarti pengelolaan dana BOS dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berubah, memungkinkan dana BOS dicairkan dengan mudah untuk mendukung aktivitas sekolah. Efektivitas mengacu pada pencapaian target dan sasaran penggunaan dana BOS dengan tepat. Efisiensi berarti pengelolaan dana BOS dapat menghasilkan output maksimal dalam waktu yang tepat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

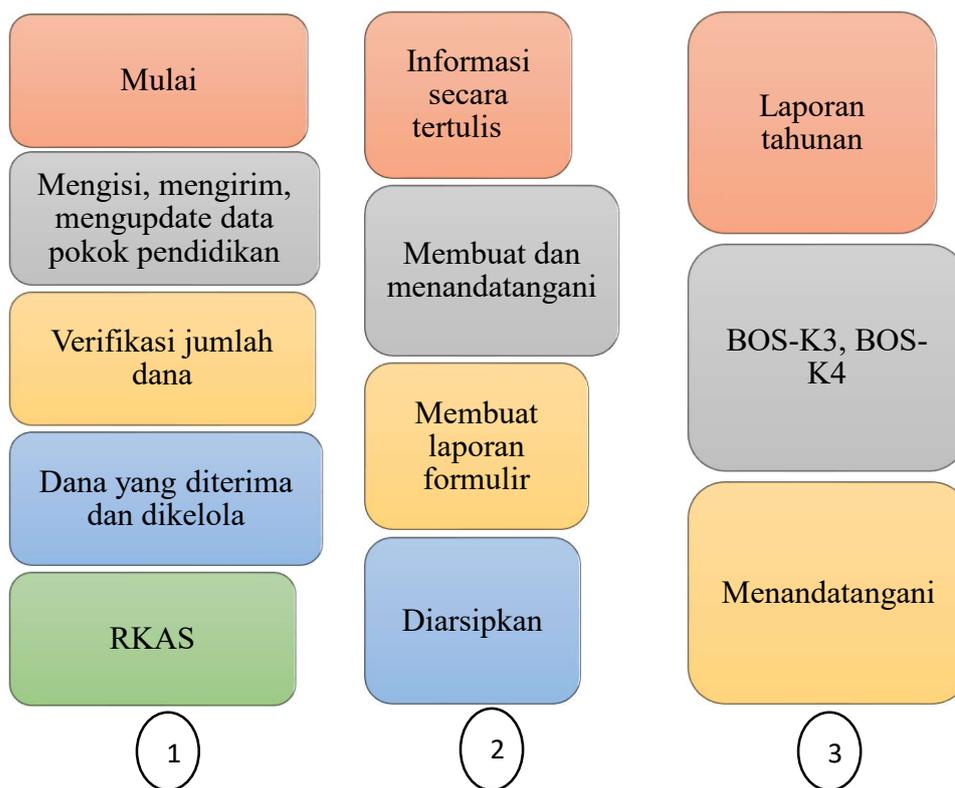
Dengan sistem informasi akuntansi yang efisien, semua transaksi dapat direkam dengan rapi. Di sisi lain, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah diajukan untuk setiap siswa yang memenuhi syarat, sebesar Rp 1.500.000 per siswa. Proses ini diawasi oleh Bendahara sekolah untuk memastikan bahwa dana BOS tersebut didistribusikan kepada siswa yang memenuhi syarat. Berikut adalah ringkasan dari penyaluran dana BOS selama tiga tahun terakhir di SMA Negeri 8 Muaro Jambi:

Tabel 1.2 Rekap Penyaluran Dana BOS pada SMA Negeri 8 Muaro Jambi Tahun 2020-2022

Jumlah Siswa	Jumlah Dana BOS/Siswa	Jumlah Dana BOS yang diterima oleh Sekolah	Tahun
721 Orang	Rp 1.500.000	Rp 1.081.500.000	2020
743 Orang	Rp 1.500.000	Rp 1.114.500.000	2021
754 Orang	Rp 1.500.000	Rp 1.131.000.000	2022

Tabel 1.2 menggambarkan bahwa sekolah harus bertanggung jawab dalam menggunakan dana yang diterimanya. Dana tersebut harus digunakan untuk membeli barang dan layanan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun oleh pihak sekolah. Setelahnya, bendahara akan mencatat pembelian dan pembayaran sekolah dalam kwitansi, dan membuat laporan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah semua kebutuhan sekolah terpenuhi. Bendahara membuat dua rangkap laporan pertanggungjawaban: satu disimpan sebagai arsip sekolah oleh kepala sekolah, dan satu lagi diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Sistem informasi akuntansi yang digunakan di SMA Negeri 8 Muaro Jambi melibatkan beberapa langkah, seperti mengisi, mengirim, dan mengupdate data pokok pendidikan, melakukan verifikasi jumlah dana, mengelola dana yang diterima, menyusun laporan RKAS, memberikan informasi tertulis, membuat dan menandatangani formulir registrasi penutupan kas serta berita acara kas, menyusun laporan realisasi anggaran dan rekap penggunaan dana, menyusun laporan tahunan (buku kas umum dan pembantu kas), melaksanakan pembukuan dengan rapi, dan menandatangani dokumen-dokumen yang relevan.

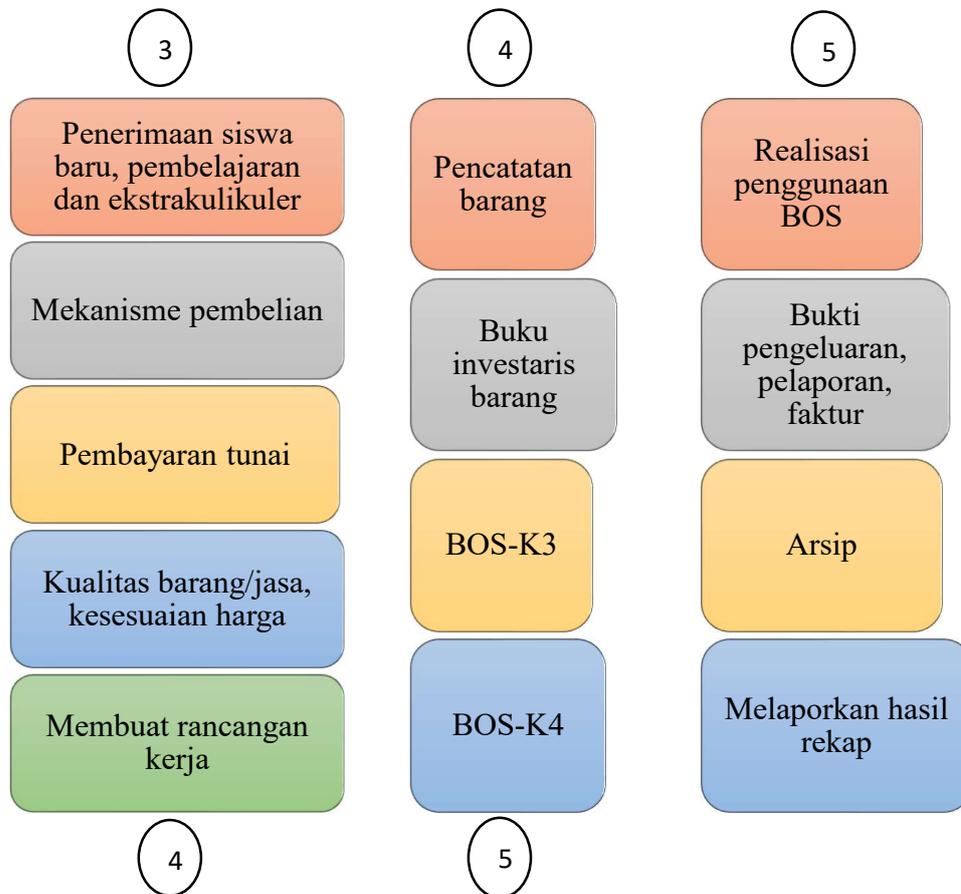


Gambar 1.1 Bagan Penerimaan Kas Dana BOS pada SMA Negeri 8 Muaro Jambi

SMA Negeri 8 Muaro Jambi menggunakan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang mencakup berbagai kegiatan, seperti:

- Membiayai penerimaan siswa.
- Mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler siswa di sekolah.
- Mengatur proses pembelian barang dan jasa.
- Melakukan pembayaran secara tunai.
- Menilai kualitas barang atau jasa, memastikan ketersediaan barang yang dipesan, menentukan harga, dan bernegosiasi mengenai kesepakatan bersama.
- Mencatat inventaris barang sekolah.
- Membuat laporan Buku Kas Umum yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana.
- Menyusun anggaran dan laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta menyampaikan surat pernyataan pertanggungjawaban yang menegaskan bahwa dana BOS sekolah digunakan sesuai dengan ketentuan BOS.
- Mengarsipkan bukti-bukti pengeluaran seperti kwitansi pembelajaran dan pembayaran barang atau jasa kegiatan sekolah, yang menjadi tanggung jawab untuk pelaporan.

- j. Melaporkan hasil rekapitulasi penggunaan dana BOS ke pusat melalui website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Gambar 1.2 Bagan Prosedur Pengeluaran Kas Dana BOS pada SMA Negeri 8 Muaro Jambi

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya masalah umum di sekolah-sekolah, seperti masih adanya pungutan biaya kepada siswa dan ketidaktransparanan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara konseptual, BOS diberikan kepada siswa yang membutuhkan, tetapi di lapangan, belum semua siswa mendapatkan layanan pendidikan yang memadai, yang bertentangan dengan konsep program BOS. Hasil wawancara dengan salah satu dewan guru di SMA Negeri 8 Muaro Jambi menunjukkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana BOS oleh sekolah dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan orang tua siswa terhadap sekolah. Ini terjadi karena jaranganya musyawarah antara sekolah dan orang tua siswa. Padahal, buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun 2022 mengamanatkan sekolah untuk memberikan informasi tertulis tentang rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester, bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan pemberian rapor.

Salah satu solusi untuk memastikan kelancaran program BOS dan meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menjalankan sistem informasi akuntansi secara efektif dan efisien di sekolah. Sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien dapat membantu manajemen dalam merencanakan program dan mengelola kegiatan operasional sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Untuk memahami gambaran tentang sistem informasi akuntansi, analisis dilakukan terhadap sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal di sebuah sekolah. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam program BOS di SMA Negeri 8 Muaro Jambi sesuai dengan teori yang mendukungnya. Analisis juga mencakup pengendalian internal sekolah, menilai apakah implementasinya efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks sistem informasi akuntansi yang diterapkan di sekolah tersebut. Oleh karena itu, analisis sistem informasi akuntansi ini diharapkan dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap keandalan dan keakuratan informasi yang dihasilkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh studi sebelumnya yang dilakukan oleh Rosita Dewi (2020) yang menginvestigasi "Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus pada SDN 012 Tanjung Gadai, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti." Namun, penelitian ini berfokus pada SMA Negeri 8 Muaro Jambi sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Alat Pengendalian Internal Sekolah (Studi Kasus pada SMA Negeri 8 Muaro Jambi)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada dana BOS yang telah diterapkan oleh SMA Negeri 8 Muaro Jambi?
2. Bagaimana pengendalian internal sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada dana BOS di SMA Negeri 8 Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada dana BOS di SMA Negeri 8 Muaro Jambi dan menganalisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada dana BOS sebagai alat pengendalian internal sekolah pada SMA Negeri 8 Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Membantu peneliti untuk mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi dan dapat membantu peneliti untuk membangun keterampilan, menambah wawasan serta pengalaman bagi peneliti.

2. Bagi Pembaca

Membantu pembaca untuk mengetahui sistem informasi akuntansi dan dapat digunakan sebagai referensi serta bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

3. Bagi Sekolah

Membantu sekolah memeriksa kembali sistem informasi akuntansi serta struktur pengendalian internalnya apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum.

4. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam menganalisa programnya dan menjadi bahan acuan program dana BOS untuk pelaksanaan berikutnya.